



Dasar Hukum

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengenaan Tarif Penertarikan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan Di Luar Perkar
- SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJ/SK/1-M02.3/2/2019 tentang Pembentukan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan Peradilan Umum

Eraterang

Elektronik Surat Keterangan

Merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada selama tersedianya jaringan internet dan Ponsel Pintar (smart phone) / Komputer

- Jenis Surat Keterangan:
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
 - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
 - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicitab Huk Piditanya
 - Surat Keterangan di Pidana Karena Kesalpaan Ringan atau Alasan Politik
 - Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

Menggunakan Barcode (grocode) untuk memeriksa keaslian Surat Keterangan

Layanan ini dapat diakses pada alamat eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id



Tahapan Permohonan



Validasi Terhadap Keaslian Surat Keterangan



Elektronik Surat Keterangan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI

 Saya bukan robot

Lupa Password ? [Reset Password](#)
Kirim Ulang Aktivasi ? [Kirim Aktivasi](#)

Belum menjadi Pengguna ? [Daftar dengan Google](#)
atau [Daftar dengan email](#)